# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Sudarsono dalam bukunya “Perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan”, Lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi akan menjadi perbincangan hangat dimasa depan. Terbukti saat ini, rentang waktu hampir satu dekade lebih sejak salah satu dari tiga isu tersebut mulai mencuat, yakni Lingkungan Hidup (Sudarsono,1996:13). Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasional juga mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.

Lingkungan Hidup menjadi pembahasan menarik bagi studi Hubungan Internasional. Perhatian dunia pada isu Perubahan Iklim dan *Transboundary*memiliki subjek utama pada permasalahan Lingkungan Hidup.Transboundary atau Lintas batasmerupakansebuahistilah yang menggambarkandampak lingkunganatau proses lainnyayang melintasi batasyurisdiksi (Knecht dan Cicin Sain,1998:464).Kawasan Laut misalnya yang masuk dalam *transboundary,* merupakan kawasan yang tidak dapat dibatasi

secara nyata. Dan oleh karenanya, laut menjadihal yang menarik untuk dipelajari dalam masalah *transboundary*.

Laut dewasa ini merupakan wilayah potensial untuk terjadinya konflik, persengketaan baik secara langsung maupun tak langsung. Permasalahan Lingkungan Hidup di wilayah laut dalam proses pengendalian kerusakan ekosistem dan biota laut yang secara tidak langsung menimbulkan permasalahan baru dalam kualitas hasil laut yang berdampak buruk pada perekonomian suatu negara apabila sumberdaya kelautan menjadi sektor utama dalam pendapatan negara. Terlebih kepada sebuah negara yang tergolong *Archipelagic state* (Negara Kepulauan) yang pada dasarnya memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar dibanding luas daratannya yang secara tidak langsung menjembatani wilayah kedaulatan negaranya dengan wilayah kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, kelestarian ekosistem laut perlu dijaga dan menjadi tanggung jawab bersama.

Indonesia misalnya, termasuk sebagai Negara Kepulauanyang sebelumnya sempat dinyatakan oleh Indonesia dalam Deklarasi Juanda dan pada akhirnya disampaikan dalam Konferensi Hukum Laut-I di Jenewa pada tanggal 13 Desember 1957.Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentang sepanjang 3.977mil  diantara dua Samudera besar, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia yang tergolong Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki sekitar 17.819 pulau yang tersebar baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Dengan begitu banyaknya pulau yang tersebar, luas wilayah Indonesia bisa mencapai 5.180.053 km2 yang terdiri dari 1.922.570 km2 berupa daratan dan 3.257.483 km2 berupa lautan. Jika

dibandingkan antara keduanya, daratan dan lautan, maka luas muatan lautan di Indonesia mencapai 62% dari total luas wilayah Indonesia, sisanya sebanyak 37% hanya dimiliki oleh daratan saja(*Tropicana Coasts Magazine* vol.16 No.2, 2010).Dengan keadaan seperti ini tentu saja Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah ruah yang menjadi potensi utama sumber pembangunan hidup bagi rakyat Indonesia.

Dengan besarnya wilayah Laut yang dimiliki Indonesia dibandingkan luas daratannya membuat wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya pesisir, meliputi pulau-pulau besar dan kecil sekitar 17.508 pulau yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumber daya hayati dan non hayati yang terkandung didalamnya (SECEM, 2009:1).

Tercatat juga bahwa Indonesia merupakan negara pemilik terumbu karang terluas di dunia (setelah Australia) dengan luas 42.000 kilometer persegi atau 17 persen dari luas terumbu karang dunia (*Tropicana Coasts Magazine* vol.16 No.2, 2010). Ekosistem terumbu karang tersebut tersebar di hampir dua per tiga garis pantai Indonesia yang panjangnya 81.000 km (SECEM, 2009:7) merupakan potensi sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya. Dengan potensi seperti ini Indonesia menjadi lirikan dunia internasional karena jumlah 17 persen terumbu karang dunia dikuasai oleh Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan oksigen untuk kehidupan laut dunia.

Ekosistem terumbu karang merupakan bagian penting dari wilayah pesisir. Terumbu karang bertanggungjawab terhadap terhindarnya pantai dari abrasi, karena ekosistem terumbu karang merupakan pertahanan alami yang efektif untuk mereduksi kecepatan dan energi gelombang laut sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai. Jika abrasi pantai terjadi pada pulau-pulau kecil yang berada di laut terbuka, maka proses penenggelaman pulau akan berlangsung lebih cepat (Dahdouh-Guebass, et al, 2005: 443-446).

Namun, kondisi ekosistem terumbu karang di Indonesia saat ini memprihatinkan.Menurut data yang dikeluarkan *Environment Departement World Bank* April tahun 2009, hanya 29 persen terumbu karang Indonesia yang masih baik. Selebihnya rusak berat.Rusaknya terumbu karang berpengaruh besar terhadap jumlah biota laut yang berada disekitar terumbu. Karena selama ini terumbu karang merupakan tempat hidup ribuan jenis ikan yang mengambil makanan dari fitoplankton yang hidup di daerah terumbu tersebut. (*Tropicana Coasts Magazine* vol.16 No.2, 2010).

Terumbu karang yang merupakan tempat pembibitan(*nursery)* dan makanan (*feeding ground)* bagi banyak populasi organisme laut dan terancam kepunahan bagi spesies yang dikategorikan langka.Dengan keadaan ekosistem terumbu karang yang rusak tentunya dapat mengancam keberlangsungan geliat perekonomian negara disektor perikanan yang nantinya akan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Indonesia memiliki banyak sekali daerah pesisir mengingat Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Salah satunya adalah daerah pesisir Kabupaten

Sukabumi, Jawa Barat yang terbentang sejauh 117 km. Pesisir Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah. Akan tetapi sumberdaya tersebut masih belum terkelola dengan baik. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah kerusakan terumbu karang di beberapa tempat di wilayah Sukabumi. Saat ini diperkirakan kawasan terumbu karang tersebut mengalami kerusakan dengan kondisi kurang baik sekitar 50% dalam keadaan rusak dengan tutupan kurang dari 10% (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi). Kerusakan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh prilaku manusia. Sebagian besar penduduk lokal pesisir umumnya memiliki tingkat pendidikan yang masih minim sehingga pola pikir terhadap pengelolaan dan menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut masih terabaikan. Sehingga kerusakan-kerusakan yang terjadi acapkali menjadi hal yang lumrah.

Kerusakan terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu dapat dikatakan sebagai gejala yang terlihat dengan kasat mata dari hasil interaksi antara manusia dengan sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Sehingga persoalan yang mendasar adalah mekanisme pengelolaan pesisir wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak efektif untuk memberi kesempatan kepada sumberdaya hayati pesisir yang dimanfaatkan pulih kembali atau pemanfaatan sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya alam lain dan mengeliminir faktor-faktor penyebab kerusakannya (SECEM, 2009:2).

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di daerah pesisir Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumimaka diperlukan pengelolaan daerah pesisir dan laut

yangterpadu melalui sistem manajemen kelautan yang apik guna untuk mengatasimasalahmanajemen yang kompleksdi daerahpesisir dan laut di Kabupaten Sukabumi. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut yang termasuk salah satu didalamnya ialah ekosistem terumbu karang. Karena terumbu karang menjadi salah satu bagian daripada ekosistem wilayah pesisir. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta yakni Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kelautan khususnya dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut.

*Partnership in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) sebuah Organisasi Internasional Pemerintahan yang bersifat regional, membangun kemitraan bagi negara-negara yang berdekatan dengan wilayah perairan laut di Asia Timur untuk bekerjasama dalam menyelamatkan Laut-laut yang ada di Asia Timur menjadi partner dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Sukabumi. Fokus PEMSEA adalah dalam bidang pengelolaan laut.PEMSEA membuat *framework* berupa *Sustainable Development* untuk Laut Asia Timur yang selanjutnya disebut sebagai *Sustainable Development Strategy for Seas East Asia* (SDSSEA). SDSSEA merupakan strategi pembangunanyang menjaminkelangsunganproduktivitassumber daya alamdan lingkungan dalam kualitas yang tinggi, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomiuntuk memenuhikebutuhan saat initanpa mengorbankankebutuhan generasi mendatang (PEMSEA,2003).Strategi pembangunan ini terus digalakkan kepada seluruh

negara yang tergabung dalam PEMSEA yakni Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Thailand.

Indonesia sebagai salah satu negara dari duabelas negara yang tergabung dalam PEMSEA sejak tahun 2003 melihat PEMSEA sebagai sebuah organisasi regional yang tepat untuk membantu permasalah pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut termasuk didalamnya ekosistem terumbu karang. Karena faktor-faktor pendorong yang menyebabkan kerusakan ekosistem tidak hanya berasal dari wilayah perairan laut itu sendiri melainkan keterhubungan akan ekosistem laut yang bersifat *transboundary* dan perilaku-perilaku masyarakat sekitar daerah pantai yang menyimpang terhadap alam atau melakukan pengrusakan yang disengaja sehingga menyebabkan ekosistem laut menjadi terancam.

PEMSEA menjalin kemitraan khusus secara langsung dengan pemerintah lokal di suatu negara yang tergabung sebagai anggota PEMSEA yang disebut sebagai PEMSEA *Network of Local Governments for Sustainable Coastal Development* (PNLG) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola sumber daya pesisir dan laut untuk pemanfaatan secara berkelanjutan, selain itu untuk memudahkan hubungan antara lembaga teknis ilmiah dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan penguatan kapasitas dan masukan ilmiah untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah berupa kebijakan dan program. PNLG terus memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sumber daya laut dan pesisir di Asia Timur melalui advokasi, berbagi ilmu pengetahuan,

penempaan *multi-stakeholder*, partisipasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga nasional, kelompok masyarakat sipil termasuk LSM dan organisasi masyarakat serta kalangan swasta.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam PNLG tersebut dengan melibatkan pemerintah daerahnya. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ikut serta dalam PNLG. Pada tanggal 24 Februari 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menandatangani *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai bukti kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan PEMSEA yang saat itu masih menjadi program regional dari *International Maritime Organization* (IMO) sehingga penandatangan dilakukan oleh IMO sendiri bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat menjadi proyek kerjasama antara PEMSEA dan Pemerintah Daerah Sukabumi dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir yang disebut sebagai *Integrated Coastal Management*(ICM) yang bertujuan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan dan sumber daya pesisir dan konservasi laut untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu proyek penerapan ICM di Kabupaten Sukabumi dapat menjadi *prototype* bagi wilayah pesisir dan laut yang lain dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut yang mungkin nantinya dapat diterapkan di wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem laut khususnya ekosistem terumbu karang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: **"PERANAN*PARTNERSHIP IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR SEAS EAST ASIA* (PEMSEA) MELALUI PROGRAM *INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT (ICM)* DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI INDONESIA (studi kasus: Palabuhanratu, Sukabumi-Jawa Barat)**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi dan Administrasi Internasional

   Didalam matakuliah ini peneliti mempelajari mengenai peran aktor yang terlibat dalam interaksi antar negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global didalamnya.

2. Teori Hubungan Internasional

   Teori Hubungan Internasional merupakan salah satu matakuliah wajib yang membahas tentang teori-teroi apa saja yang menjadi landasan atau acuan dalam mengkaji permasalahan ilmu hubungan internasional. Classical Theory, Critical theory, hingga teori hubungan internasional kontemporer dibahas dalam matakuliah ini.

3. Isu-isu Global

Pada matakuliah ini membahas tentang isu-isu apa saja yang menjadi perbincangan hangat dalam studi Ilmu Hubungan Internasional kekinian, seperti Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Demokratisasi, dll

4. Studi Ekonomi Negara Berkembang

   Merupakan matakuliah yang mempelajari tentang permasalahan apa saja yang terjadi di negara berkembang dan upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pembangunan di Negara Berkembang.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekosistem terumbu karang diPalabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawabarat?
2. Usaha apa saja yang dilakukan PEMSEA untuk menjalankan program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang diPalabuhanratu, Sukabumi-Jawa Barat?
3. Kendalaapa saja yang dihadapi PEMSEA dalam menjalankan program *Integrated Coastal Management*(ICM) di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat?
4. Apa hasil pelaksanaan dari program*Integrated Coastal Management*(ICM)terhadap pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang diPalabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada upaya yang dilakukan *Partnership in Environmental Management for Seas East Asia*(PEMSEA) melalui program *Integrated Coastal Management* (ICM)dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang diPalabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Baratdengan masa waktu yang telah dipilih mulai tahun 2003 yaitu awal program ICM dilaksanakan di Kabupaten  Sukabumi-Jawa Barat dan perkembangannya selama tujuh tahun hingga tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 660.1/Kep.56-BLH/2008.

## 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimana upaya yang dilakukan*Partnership in Environmental Management for Seas East Asia (PEMSEA)* melalui program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.**

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kondisi ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa program yang dilaksanakan PEMSEA dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kendala yang dihadapi PEMSEA dalam menjalankan program *Integrated Coastal Management*(ICM) di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa hasil pelaksanaan dari program*Integrated Coastal Management*(ICM)dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang diPalabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

#### 1.5.2.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti dalam menyusun skripsi di bidang Ilmu Hubungan Internasional
2. Untuk memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hubungan Internasional dalam kajian Lingkungan Hidup.

#### 1.5.2.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.
2. Sebagai salah satu syarat wajib untuk meraih gelar kesarjanaan (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia**.**

## 1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

### 1.6.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya tujuan utama Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam interaksi internasional. Perilaku dapat berwujud kerjasama, perang, konflik, pembentukan aliansi dalam Organisasi Internasional dan sebagainya. Interaksi internasional menjadi salah satu kunci terjadinya hubungan antar negara yang selanjutnya menjadi hubungan internasional.

Hubungan Internasional menurut Muchtar Mas'oed mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

> "Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari prilaku internasional, yaitu prilaku aktor-aktor internasional baik aktor Negara maupun aktor non Negara.Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi wadah organisasi internasional"(Mas'oed,1995:18)

Dalam penelitian ini memiliki fokus interaksi internasional antara aktor negara dan non-negara yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan

PEMSEA. Sementara pendapat lain dari JC. Johari mengenai Hubungan Internasional adalah:

> "Studi tentanghubungan politikantara negaraataumelintasi batas-batasnegara;Salah satubidang padailmu politiksubdivisiutama antara lainstudistrategis,organisasi internasional, danekonomi politikinternasional."(Calhoun,2002:22)

Masih relevan dengan penjelasan diatas, *R.Soeprapto* menjelaskan mengenai studi hubungan internasional: "merupakan studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku ) yang sering mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelasnilainya seperti mensubtitusikan perang dengan metode-metode perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, perlindungan terhadap lingkungan, pemberantasan penyakit, kemelaratan manusia"(Soeprapto, 1997:17).

Hubungan Internasional pada masa lampau terfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsungdalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai "*high politics*" (Rudy, 2005:1).

Sedangkan saat ini hubungan internasional telah berkembang mengikuti arus zaman yang sifatnya lebih kontemporer. Hubungan internasional kontemporer tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara, akan tetapi juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*) seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, perusahaan transnasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-

organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender dan lain sebagainya (Rudy, 2005:1)

Isu Lingkungan Hidup merupakan isu terbaru dalam studi hubungan internasional. Runtuhnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan dalam konstelasi politik internasional. Pada perkembangan ini isu Lingkungan Hidup termasuk dalam isu-isu global sebagai akibat daripada proses globalisme.Isu Lingkungan Hidup juga dapat dikategorikan kedalam Hubungan Internasional Kontemporer.

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Lingkungan Hidup sebagai:

> "Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Lingkungan Hidup dalam dunia Internasional saat ini menjadi fokus utama, karena pada prosesnya permasalahan lingkungan hidup merupakan pergeseran dari isu nasional yang berkembang menjadi isu global. Dapat dijelaskan, isu global merupakan permasalahan, dilema, dan tantangan yang secara berkaitan dengan unsur-unsur atau keperluan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional, perdamaian, keamanan, keadilan, kebebasan, dan ketertiban internasional (Boyd dan Pentland, 1981:5-6).

Dalam setiap kajian mengenai Lingkungan hidup tidak akan pernah telepas dari teori kehidupan. Ekosistem menjadi salah satu pembahasan yang menspesifikkan wilayah kajian lingkungan hidup.Ekosistem merupakan sebuah sistem ekologi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Ekosistem menurut Benny Joseph dalam bukunya *"Environment Studies"* menngemukakan ekosistem sebagai:

> "Ekosistem adalahkumpulanbiotiktanaman, hewan, dan mikroba, bila digabungkan dalam lingkunganfisikokimia.Dalamekosistemterdapat pngelolaan kehidupan secara biologis olehtigakelompok, yakniprodusen, konsumen, dan dekomposer/daur ulang" (Joseph,2005:73).

Didalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan ekosistem sebagai:

> "Ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup".

Ekosistem kemudian terbagi lagi menjadi ekosistem darat (hutan hujan, padang rumput,sabana, gurun, taiga, tundra, hutan gugur dan karst/batu gamping) dan ekosistem air (air laut, air tawar, payau).

Ekosistem laut sebagai salah satu ekosistem di dunia, merupakan suatu dunia sendiri, di mana ada di dalamnya terdapat proses dan komponen-kompenen kehidupan yang serupa dengan proses yang terjadi pada ekosistem daratan Indonesia salah satunya pemilik ekosistem laut terbesar, merupakan sebuah Negara Kepulauan yang daerah perairannya lebih luas daripada daratannya. Ekosistem air laut dibedakan atas ekosistem lautan, ekosistem pantai, ekosistem estuari (muara), dan ekosistem terumbu karang(Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dari website resmi http://pplhpuntondo.org/program/ekosistem-laut/diakses pada 8 Febuari 2012).

Ekosistem pantai disebut juga ekosistem pesisir yang merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati dan non-hayati, mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan meningkatkan mutu kehidupan. Komponen hayati dan non-hayati secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut, maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam kesatuanstruktur fungsional maupun dalam keseimbangannya (SECEM, 2008:8).

Salah satu bagian ekosistem yang terkait dengan ekosistem wilayah pesisir adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan pertahanan alami yang efektif untuk mereduksi kecepatan dan energi gelombang laut sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi di wilayah pesisir atau pantai(Dahdouh-Guebass, et al, 2005).

Ekosistem terumbu karang terdiri dari didominasi karang batu dan organisme-organisme lainnya, daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Dalam hal ini fokus utama permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terletak pada ekosistem pesisir dan lautnya.

Didalam Keputusan Menteri No.04 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, mendefinisikan terumbu karang sebagai:

> "Terumbu karang merupakan kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya".

Terumbu karang memiliki perhatian khusus dalam isu Lingkungan Hidup. Karena terumbu karang menjadi tempat hidup bagi 25% kehidupan laut dan

menempati seperempat lingkungan laut dunia (Carol, 2009: 12). Hal ini menyebabkan terumbu karang menjadi salah satu indikator yang dapat digunakanuntuk melihat kondisi baik tidaknya suatu ekosistem laut. Semakin baik keadaan terumbu karang didalamnya maka akan semakin baik pula keadaan ekosistem lautnya dan berbanding lurus dengan potensi sumberdaya laut yang dihasilkan.

Saat ini berbicara mengenai isu Lingkungan Hidup tidak akan pernah terlepas dari ranah politik. Masalah Lingkungan Hidup juga merupakan permasalahan politik. Hal tersebut disebabkan karena secara faktual banyak tragedi di lingkungan negara berkembang bersumber dari proses politik maupun kebijaksanaan pemerintah *(state-sponsored activities)* yang belum tepat.

Salah satu kajian mengenai Lingkungan Hidup yang masuk dalam ranah politik ialah Politik Lingkungan (*Environment Politics)*. Seperti yang dilontarkan oleh kaum yang menyebut dirinya sebagai enviromentalis. Mereka menerima suatu kerangka atas struktur politik, sosial, ekonomi, dan normatif dari politik internasional yang ada, berupaya untuk memperbaiki permasalahan lingkungan dalam struktur tersebut. Dalam politik hijau terdapat istilah ekosentrisme sebuah penolakan terhadap pandangan dunia antroposentris yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia menuju sebuah pandangan yang juga menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup pada dasarnya ‘terikat hubungan dengan ekologi’yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Eckersley 1992 dalam Burchill & Linklater, 2009 :49) .

Ekosentrisme memiliki empat ciri utama, pertama ekosentrisme mengidentifikasi semua kepentingan manusia terhadap dunia bukan-manusia. Kedua, ekosentrisme mengidentifikasi masyarakat bukan-manusia. Ketiga, ekosentrisme mengidentifikasikan kepentingan generasi masa depan manusia dan bukan-manusia. Sehingga pada akhirnya, ekosentrisme menerapkan suatu perspektif holistik dan bukan atomistik yaitu dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan alam secara keseluruhan seperti halnya organisme individu (Eckersley 1992 dalam Burchill & Linklater, 2009 :46).

Oleh karena itu, Politik Lingkungan merupakan upaya untuk tidakmemberikan *treatment* secara ilmiah tentangsifat daritantangan utama lingkunganyang dihadapidunia,melainkan untukmengeksplorasikekuatan politikinternasional yangbekerja untukmempersulitnegosiasi danpelaksanaankebijakan lingkungansuatu negara dalam menganalisakekuatan dan kelemahanmekanismeinstitusionaldiberbagainegara yang telahberusaha untukbekerja samadalam mengelolamasalahlingkungan, danuntuk menilairelevansinya untuk masa depan.Kelemahan mekanisme institusional dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan suatu negara mengakibatkan tumbuhnya organisasi-organisasi internasional di negara maju dan berkembang sebagai reaksi dari kerusakan lingkungan yang kurang diperhatikan pemerintah yang ada.

Dalam hal ini Organisasi Internasional lahir sebagai penengah untuk membantu apabila suatu negara tidak mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak pihak dalam hal ini antar negara. Seperti dalam permasalahan *transboundary*, laut, perlu adanya kerjasama antar negara yang secara geografis

lautnya saling berhubungan demi menjaga kelestarian ekosistem dan biota laut didalamnya.

Organisasi Internasional merupakan salah satu kajian dalam Studi Hubungan Internasional, yang merupakan *non State Actor* yang dapat memainkan perannya dalam mempengaruhi kebijakan dalam negeri *(National Act)* suatu negara melalui kerjasama yang dilakukan.

Organisasi Internasional juga merupakan sebuah wadah internasional yang beranggotakan lebih dari satu negara yang memiliki tujuan bersama. Organisasi Internasional memuat perjanjian-perjanjian multilateral yang nantinya berfungsi sebagai legitimasi atas interaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh negara anggota. Hal ini diungkapkan *Bowett DW*Dalam bukunya ”Hukum organisasi internasional” Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa:

> ”tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkanperjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya” (Bowett, 1995: 17).

Menurut Clive Archer, Organisasi Internasional memiliki peranan sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat maupun menggalang kerjasama.
3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan (salah satunya adalah bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Rudy, 2005:29)

Dalam lingkup penelitian ini, *Partnership in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) sebagai Organisasi Internasional yang memiliki peranan sebagai wadah yang berguna untuk mencapai tujuan bersama yaitu penyelamatan ekosistem laut yang ada di wilayah Asia Timur yang nantinya berdampak pada kualitas sumberdaya laut yang akan diperoleh.Disamping itu PEMSEA juga menjadi instrumen atau media untuk menjalin kerjasama untuk negara-negara yang memiliki keterlibatan langsung dengan wilayah perairan diAsia Timur.

Organisasi Internasional dapat digolongkan berdasarkan ruang lingkup, fungsi, kewenangan dan lain sebagainya sebagai bentuk kegiatan administrasinya:

1. Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (*International Governmental Organization*) yang lazim disebut IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.

2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*International Non-Governmental Organization*) yang lazim disingkat INGO. INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan dan kesenian. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum perdata (Rudy, 2005:5)

PEMSEA dapat digolongkan sebagai sebagai *International Governmental Organization* (IGO) karena anggotanya merupakan dari kalangan pemerintahan suatu negara.

Organisasi Internasional pun dapat diklasifikasikan menurut aktivitas-aktivitas yang dijalankan untuk mencapai tujuannya. Klasifikasinya meliputi:

1. *High Politic Organization*

   Memusatkan perhatian pada masalah-masalah diplomasi dan militer yang berkaitan langsung dengan keamanan dan kedaulatan negara-negara dan berhubungan dengan tatanan fundamental sistem internasional

2. *Low Politic Organization*

   Mengarah pada masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup (Rosenau,Thomson dan Boyd, 1976:628)

Berdasarkan pengklasifikasian diatas PEMSEA dikategorikan sebagai organisasi internasional yang bergelut dibidang *low politic* yakni memfokuskan diri pada isu lingkungan hidup yakni Laut.

Dalam sebuah organisasi internasional terdapat kerjasama internasional yang nantinya bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Kerjasama internasional adalah suatu keharusan bagi negara-negara yang berkepentingan

untuk meminimalkan resiko dari bencana alam yang melewati batas. Kerjasama ini juga ditujukan untuk meminimalisasi dampak dari bencana yang telah terjadi serta memperbaiki kondisi lingkungan yang telah terlanjur rusak akibat bencana tersebut (Isnaeni, 2006:25).

Dalam menjalin kerjasama antara negara dan organisasi internasional diperlukan kekuatan hukum yang sah (*legacy*) sebagai pedoman atau alur proses dan pelaksanaan atas kesepakatan bersama yang disebut sebagai Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional lazimnya dibuat dalam bentuk *Memorandum of Agreement* (MoA) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai bentuk legitimasi atas kesepakatan bersama yang biasanya telah disepakati melalui program-program yang dicanangkan para anggotanya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayah Palabuhanratu telah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang bernama PEMSEA dengan MoA yang telah disepakati bersama sejak Februari tahun 2003.

PEMSEA memiliki *legal framework* yang terus menerus digalakkan bagi negara anggotanya yang disebut sebagai *Sustainable Development Strategy for Seas East Asia* (SDSSEA).*Sustainable Development* merupakan Strategi pembangunanyang menjaminkelangsunganproduktivitassumber daya alamdan lingkungan dalam kualitas yang tinggi, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomiuntuk memenuhikebutuhan saat initanpa mengorbankankebutuhan generasi mendatang (PEMSEA,2003:8).Strategi pembangunan ini bertujuan

sebagai *framework* bagi negara-negara anggota dalam pengelolaan laut dan pesisir di Asia Timur.

Dari strategi pembangunan berkelanjutan untuk wilayah perairan di Asia Timur (SDS-SEA), PEMSEA menggalakkan program *Integrated Coastal Management* (ICM). Secara singkat ICMdapat didefinisikan sebagai sistem manajemen sumberdaya alamdan lingkunganyang mempekerjakan melalui pendekatan integratifholistik danprosesperencanaaninteraktifdalam mengatasimasalahmanajemen yang kompleksdi daerahpesisir dan laut. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut. Manajemen yang diberikan melalui ICM ini mencakup seluruh aktivitas yang bersinggungan langsung dengan wilayah perairan laut dan pesisir termasuk dalam pengendalian terumbu karang.Penerapan ICM di Palabuhanratu untuk pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang telah melibatkan berbagai sektor pengembangan, karena sesuai fungsi utamanya bahwa ICM merupakan, *pertama*, Perencanaan Kawasan, rencana bagi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut masa kini dan mendatang, memberikan visi jangka panjang. *Kedua*, Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya, perlindungan basis ekologis wilayah pesisir dan laut; pelestarian keanekaragaman hayati; jaminan keberlanjutan pemanfaatan. *Ketiga*, Penyelesaian Konflik, harmonisasi dan keseimbangan antara pemanfaatan saat ini dan potensi pemanfaatan kedepan; penyelesaian konflik antar pengguna wilayah pesisir dan laut (Mapparesa, 2005:7).

Dalam pelaksanaannya, ICM di Palabuhanratu meliputi berbagai aspek yang tidak terlepas dari ketiga fungsi utama ICM untuk pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu Kab. Sukabumi.Oleh karena itu ICM melalui terlaksananya lima fungsi utamanyasebagai program manajemen akan sangat membantu dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karangdi Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat sehingga kualitas sumberdaya laut yang akan diberikan alam dapat terjaga.

PEMSEA melakukan menjalankan tujuannya melalui *legal framework* berupa SDSSEA yang memiliki program ICM sebagai media pelaksanannya. Dengan upaya seperti ini PEMSEA memiliki visi untuk bersama-sama membangun kawasan Laut yang terdapat di Asia Timur sebagai ekosistem laut terbesar didunia.

### 1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah di atas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

**"Peranan *Partnership in the Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA)melalui Program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karangdapat ditunjukkan melalui Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya dan Penyelesaian Konflik, diPalabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat"**

### 1.6.3 Definisi Operasional

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis diatas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. *Partnership in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) sebuah Organisasi Internasional Pemerintah yang bersifat regional, membangun kemitraan bagi negara-negara yang berdekatan dengan wilayah perairan Laut Asia Timur untuk bekerjasama dalam menyelamatkan Laut Asia Timur. Fokus PEMSEA adalah dalam bidang pengelolaan laut. PEMSEA telah diformasikan sejak tahun 1994 dengan adanya isu Lingkungan hidup berupa *Marine Pollution* yang melibatkan Negara Cina pada saat itu.
2. *Partnership in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) sebagai Organisasi Internasional Pemerintah yang memiliki peranan sebagai wadah yang berguna untuk mencapai tujuan bersama yaitu penyelamatan ekosistem laut wilayah Asia Timur yang nantinya berdampak pada kualitas sumberdaya laut yang akan diperoleh. Disamping itu PEMSEA juga menjadi instrumen atau media untuk menjalin kerjasama untuk negara-negara yang memiliki keterlibatan langsung dengan Laut Asia Timur.
3. PEMSEA membuat framework berupa *Suistanable Development* untuk Laut Asia Timur yang selanjutnya disebut sebagai *Suistanable Development Strategy for Seas East Asia* (SDSSEA). SDSSEA merupakan Strategi pembangunanyang menjaminkelangsunganproduktivitassumber daya alamdan lingkungan

dalam kualitas yang tinggi, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomiuntuk memenuhikebutuhan saat initanpa mengorbankankebutuhan generasi mendatang (PEMSEA,2003:8). Strategi pembangunan ini terus digalakkan kepada seluruh negara yang tergabung dalam PEMSEA.

4. *Integrated Coastal Management* (ICM) sebagai salah satu program yang dilahirkan dari SDSSEA. Secara singkat ICM dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen sumberdaya alamdan lingkunganyang mempekerjakan melalui pendekatan integratifholistik danprosesperencanaaninteraktifdalam mengatasimasalahmanajemen yang kompleksdi daerahpesisir dan laut. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut.
5. Ekosistem terumbu karang terdiri dari didominasi karang batu dan organisme-organisme lainnya, daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Ekosistem terumbu karang juga merupakan pertahanan alami yang efektif untuk mereduksi kecepatan dan energi gelombang laut sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai.

## 1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, bertujuan untuk mennggambarkan fakta-fakta yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnyametode ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang diteliti (Nasir, 1988:63).

### 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan,Penelusuran data online, Dokumentasi, Wawancara dan Observasi.

Studi Kepustakaan**,** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaan teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Penelusuran data *online*, Burhan Bungin mengatakan bahwa metode penelusuran data *online* merupakan cara untuk melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

Metode Dokumentasi**,** yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonseia di Jakara *(Focal Point of PEMSEA)*, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor di Bogor.

Observasi. Teknik Observasi dilakukan untuk menarik referensi (kesimpulan) ihwal dan makna sudut pandang informan, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati. Melalui observasi peneliti akan melihat pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory in use*) dan sudut pandang informan yang mungkin tidak terdapat melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian yang terkait dalam wawancara.

## 1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.8.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yangbersumber dari berbagai tempat, diantaranya:

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

   Jalan Dipatiukur No.112-114 Bandung 40132

b. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

   Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas - Jakarta Timur 13410

c. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

   Komplek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu

d. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB)Jalan Pajajaran 1, Bogor

e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

   Jalan Raya Cimaja KM 10 Cisolok Palabuhanratu Sukabumi

f. Perpustakaan FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung

   Jalan Ciumbuleuit, Bandung

g. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran Bandung

   Jalan Raya Jatinangor, Bandung

| No. | Kegiatan | Waktu Penelitian |
|---|---|---|

### 1.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2012. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel I.1**

**Jadwal Rencana Penelitian**

| | | 2012 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | |
| 2. | Pembuatan Usulan Penelitian | | | | | | | | |
| 3. | Seminar Usulan Penelitian | | | | | | | | |
| 4. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan dan pengolahan data | | | | | | | | |
| 6. | Sidang | | | | | | | | |

**2012**

## 1.9 Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memaparkan hasil penelitian ini, peneliti menjabarkannya dengan sistematika penulisan antara lain:

**BAB I**

Bab ini merupakan langkah awal peneliti untuk menuangkan rencana penelitiannya yang dipaparkan melalui beberapa sub-bab yang menjelaskan tentang alasan-alasan peneliti memilih judul ini sebagai bentuk penelitiannya. Penjelasan dari beberapa sub-bab ini yang akan menjadi media untuk menuangkan alasan-alasan peneliti secara ilmiah, antara lain: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian serta sistematika penelitian.

**BAB II**

Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai landasan-landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni teori Hubungan Internasional, teori Kerjasama Internasional, teori Organisasi Internasional, teori Lingkungan Hidup, teori Politik Lingkungan, teori Ekspor dan teori Hasil Laut.

**BAB III**

Didalam bab ini peneliti akan membahasa mengenai organisasi PEMSEA antara lain membahas tentang sejarah berdirinya PEMSEA, visi, misi dan peranan organisasi; Kronologis bergabungnya Indonesia di PEMSEA; struktur organisasi; kinerja PEMSEAKemudian bab ini juga akan menjelaskan mengenai program-

program PEMSEA yang berkaitan dengan permasalah *Marine and Coastal* terutama mengenai upaya PEMSEA dalam pengendalian kerusakan ekosistem dan biota laut di Indonesia melalui ICM.

Bab ini juga akan menjelaskan tentang latar belakang Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat bergabung menjadi anggota PEMSEA*Networks Local Government*(PNLG)dalam bidang *Marine and Coastal Managements*. Bab ini akan serta merta memaparkan apa itu ICM, komponen-komponen yang terdapat didalam ICM, Kronologis kerja ICM di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.

**BAB IV**

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yakni berupa bentuk-bentuk pelaksanaan ICM di Pelabuhanratu, Sukabumi-Jawa Barat; menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat ICM diterapkan di Pelabuhanratu, Sukabumi-Jawa Barat; Evaluasi peranan PEMSEA melalui program ICM yang dilaksanakan di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.

**BAB V**

Bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan disajikan dalam bentuk rangkuman yang singkat, padat, jelas dan informatif. Dan pada bagian akhir akan dimuat ulang hipotesis dengan penegasan bahwa hipotesis dapat diterima atau ditolak.